



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MUARA UYA
KABUPATEN TABALONG**

**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN MUARA UYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong tahun 2025 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Muara Uya, Juli 2025

Camat Muara Uya,



AI DY RISYAWAL, S.STP, M.Sos

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19900502 201010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan..... 7

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025 7

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025 12

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah..... 18

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah 19

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 27

BAB IV PENUTUP..... 35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian antara Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 dengan APBD Kecamatan Muara Uya Tahun 2025	8
Tabel 2.2	Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Anggaran pada Renja dan APBD Kecamatan Muara Uya Tahun 2025	9
Tabel 2.3	Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Muara Uya sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	13
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Uya	19
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tabalong	24
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Muara Uya Tahun 2025	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025. Renja Tahun 2025 telah disusun pada tahun 2024 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, hasil pengendalian pelaksanaan renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2025. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor P-668/Bappedalitbang.P2E/050/04/2025 tentang Penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025, bahwa SKPD melakukan penyesuaian terhadap Renja sehubungan dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Selain berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024, Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya Tahun 2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
 15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019–2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);
 16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
 17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 29).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

2. Tujuan

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Uya sampai dengan triwulan II tahun 2025 dengan mengacu pada APBD tahun 2025 yang sudah disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenan

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Kecamatan Muara Uya dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Muara Uya dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah kegiatan dalam renja sama dengan jumlah kegiatan yang ada dalam APBD, yaitu ada 10 kegiatan yaitu : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap Sub Kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Muara Uya dengan APBD Tahun 2024, jumlah sub kegiatan yang ada pada renja tahun 2024 sebanyak 28 sedangkan sub kegiatan yang ada di APBD Tahun 2025 sebanyak 32. Hal ini terjadi sehubungan dengan pengurangan anggaran pada saat asistensi.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2024

Anggaran Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 sebesar Rp.6.485.841.559 ,- sedangkan anggaran APBD Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 sebesar Rp. 5.490.860.921. Terdapat selisih antara anggaran APBD dan Renja Tahun 2025 sebesar Rp. 994.980.638,- seiring dengan proses penganggaran yang berjalan.

Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2024 dengan APBD Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawahini :

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian antara Renja Kecamatan Muara Uya Tahun 2025 dengan APBD Kecamatan Muara Uya Tahun 2024

No	Uraian	Renja 2025	APBD 2024
1	Program	6	6
2	Kegiatan	12	13
3	Sub Kegiatan	32	28
4	Pagu Anggaran	Rp 6.414.841.159	Rp 3.925.674.043

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Anggaran pada Renja dan APBD Kecamatan Muara Uya Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2025		APBD 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	UNSUR KEWILAYAHAN			6.414.841.159		5.364.386.043
7.01	KECAMATAN			6.414.841.159		5.364.386.043
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP (predikat)	B	5.557.916.734	B	3.330.724.491
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	44.770.920	8 Dokumen	10.939.610
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra/Renja, Renstra-P/Renja-P	2 Dokumen	4.167.280	2 Dokumen	2.233.910
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.167.280	1 Dokumen	1.414.085
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.167.280	1 Dokumen	1.414.085
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.167.280	1 Dokumen	1.425.740
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.167.280	1 Dokumen	1.400.510
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen	8.001.560	1 Dokumen	1.525.640
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	1 Dokumen	1.354.092	1 Dokumen	1.525.640
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Data Statistik Sektoral daerah		14.208.560		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	20 Dokumen	2.967.194.752	20 Dokumen	2.555.131.715
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2.956.149.000	14 Bulan	2.552.994.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumah laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahunan SKPD	2 Laporan	3.042.280	2 Laporan	1.441.035
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	8.003.472	18 Laporan	696.680
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Perangkat Daerah yang disusun			3 Dokumen	2.997.956
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD					2.997.956

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2025		APBD 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	378.032.381	100%	304.100.343
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Kantor	12 Bulan	7.512.786	12 Bulan	6.540.414
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	192.935.855	12 Bulan	33.902.600
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	15.117.740	12 Bulan	6.543.329
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan			24.400.000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	350 OK	138.066.000	350 OK	257.114.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			922.093.238		127.747.584
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			178.052.532		
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	1 Paket	744.040.706	1 Paket	127.747.584
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan PD	100%	353.579.790	100%	252.913.723
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	12 Bulan	43.200.000	12 Bulan	37.200.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	310.379.790	12 Bulan	215.713723
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	35 Unit	892.245.653	35 Unit	77.940.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Kantor	10 Unit	108.780.000	10 Unit	63.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	25 Unit	21.520.000	25 Unit	14.940.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			761.945.653		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	85%	152.038.740	85%	111.137.608
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 Laporan	133.954.034	3 Laporan	111.137.608

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2025		APBD 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Kegiatan MTQ	1 Laporan	133.954.034	1 Laporan	87.794.920
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Forum Kecamatan Sehat	2 Laporan	18.084.706	2 Laporan	23.324.688
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	85%	184.101.344	85%	137.560.423
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	14 Desa	21.816.200	14 Desa	30.293.828
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Desa	21.816.200	14 Desa	30.293.828
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	85%	162.285.144	85%	107.266.595
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1400 Keluarga	162.285.144	1400 Keluarga	107.266.595
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	14 Desa	83.436.000	14 Desa	110.390.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	14 Patroli Terpadu	83.436.000	14 Patroli Terpadu	110.390.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Patroli Terpadu Pembinaan Kamtibmas / FORKOPIMCA	14 Patroli Terpadu	83.436.000	14 Patroli Terpadu	110.390.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	85%	357.368.349	85%	155.524.601
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	357.368.349	1 Laporan	155.524.601
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Kegiatan Peringatan HUT RI	1 Laporan	341.331.549	1 Laporan	125.985.865

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENJA 2025		APBD 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14 Dokumen	16.036.800	14 Dokumen	29.538.736
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	85%	79.979.992	85%	80.336.920
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan Desa yang di bina dan di awasi	14 Desa	79.979.992	14 Desa	80.336.920
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen APBDes dan SISKEUDES	14 Desa	60.568.800	14 Desa	80.336.920
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			19.411.192		

Berdasarkan data perbandingan antara Renja 2025 dan APBD 2024 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 100 persen. Namun yang menjadi catatan, indikator dan target pada APBD pada sebagian kegiatan dan sub kegiatan masih belum sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan di Renja 2025. Hal ini disebabkan oleh tidak diinputnya / tidak diperbaruinya indikator dan target Renja 2025 ke dalam sistem SIPD sehingga hasil cetak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagian besar masih menampilkan target indikator lama.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Muara Uya sampai triwulan II tahun 2025.

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Uya sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	UNSUR KEWILAYAHAN		6.414.841.159		1.132.399.185	43,59%	28,84%	
7.01	KECAMATAN		6.414.841.159		1.132.399.185	43,59%	28,84%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP (predikat)	5.557.916.734	B	1.065.559.185	47,20%	-	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	44.770.920	8 Dokumen	0	0%	%	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.167.280	2 Dokumen	0	0,00%	2 Dokumen	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	4.167.280	1 Dokumen	0	0,00%	-	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.167.280	1 Dokumen	0	0,00%	-	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	4.167.280	1 Dokumen	0	0,00%	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.167.280	1 Dokumen	0	0,00%	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja	8.001.560	4 Laporan	0	0,00%	2 Laporan	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	1.724.400	1 Dokumen	0	0,00%	1 Dokumen	
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	14.208.560	14 Desa Data	0	0,00%		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	2.967.194.752	20 Dokumen	1.345.585.552	45,35%	45,35%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	2.956.149.000	14 Bulan	1.345.585.552	45,35%	7 Bulan	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.042.280	3 Laporan	0	0,00%		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	8.003.472	1 laporan	0	0,00%		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.032.381	100%	132.465.260	40.31%	50%	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Kantor	7.512.786	12 Bulan	0	0%	6 Bulan	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.935.855	12 Bulan	70.570.000	36.58%	6 Bulan	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	15.117.740	12 Bulan	1.440.000	9.53%	1 Bulan	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan yang disediakan	24.400.000	12 Bulan	1.200.000	4.92%	1 Bulan	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	138.066.000	378 OK	59.255.260	66.86%	OK	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Alat yang Dibeli	922.093.238	2 Unit	250.300.560	27.14%		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Unit Mebel yang disediakan	178.052.532	58 unit	56.050.560	31.48%	Unit	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	744.040.706	26 Unit	194.250.000	26.11%	4 Unit	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	353.579.790	100%	130.820.247	37%	40%	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	43.200.000	12 Bulan	22.567.747	52.24%	6 Bulan	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.379.790	12 Bulan	108.252.500	34.88%	6 Bulan	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	892.245.653	25 Unit	740.605.114	83%	15%	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Kantor	108.780.000	10 Buah	24.457.122	22.48%	Buah	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	21.520.000	15 Unit	0	0,00%	2 Unit	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	761.945.653	3 Unit	716.147.992	93.99%	3 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	152.038.740	85%	3.600.000	3.51%	25%	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	152.038.740	3 Laporan	3.600.000	3.51%	25%	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Kegiatan MTQ	133.954.034	1 Laporan	3.600.000	4.26%	20%	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.084.706	2 Laporan	0	0,00%	1 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	184.101.344	85%	62.820.703	36.62%	20%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	21.816.200	14 Desa	0	0%	15%	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pemerintahan Desa yang dibina/diberdayakan	21.816.200	14 Desa	0	0%	14 Desa	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	162.285.144	4000 Keluarga	62.820.703	41.96%		
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan	162.285.144	4000 Keluarga	62.820.703	41.96%		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)	83.436.000	14 Desa	28.010.000	33.57%	35,06%	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	83.436.000	14 Patroli Terpadu	28.010.000	33.57%	35,06%	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Patroli Terpadu Pembinaan Kamtibmas / FORKOPIMCA	83.436.000	14 Patroli Terpadu	28.010.000	33.57%	5 Patroli Terpadu	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
			Keuangan (Rp.)	Kinerja %	Keuangan (Rp.)	Keuangan %	Kinerja %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	357.368.349	85%	6.000.000	1.88%	10,95%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	357.368.349	1 Laporan	6.000.000	1.88%	10,95%	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	341.331.549	1 Laporan	6.000.000	1.98%	10,95%	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.036.800	1 Dokumen		0%	0%	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	79.979.992	85%	30.930.000	38.67%	0.00%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	79.979.992	14 Desa	30.930.000	38.67%	Desa	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60.568.800	14 Desa	14.660.000	24.20%	Desa	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.411.192	14 Desa	16.270.000	83.82%	Desa	

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Muara Uya sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuai format evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi terlampir). Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Kecamatan Muara Uya telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.132.399.185,- atau sekitar 36,79 persen dari total anggaran untuk tahun 2025. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan II dan III, diantaranya yaitu :

Administrasi Umum Perangkat daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan :
- a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan :
- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Muara Uya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya :

- 1. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK).
- 3. Pelayanan penerbitan Keterangan Pindah.
- 4. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat.
- 5. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 6. Menggkordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 7. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam membangun desa.
- 8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 9. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Muara Uya menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Uya, diantaranya :

- 1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya.
 - 2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 3. Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- Disamping itu, kinerja pelayanan perangkat daerah yang merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maka capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Perubahan Renstra Kecamatan Muara Uya adalah :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Uya

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi		
		2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
1	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	65%	70%	75%	80%	85%	70%	75%	
3	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	65%	70%	75%	80%	85%	70%	75%	
4	Nilai AKIP	B	B	B	B	B	B	(Belum Ada Penilaian)	

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong, maka Kecamatan Muara Uya mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Kecamatan

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

b. Tugas Pokok Kecamatan

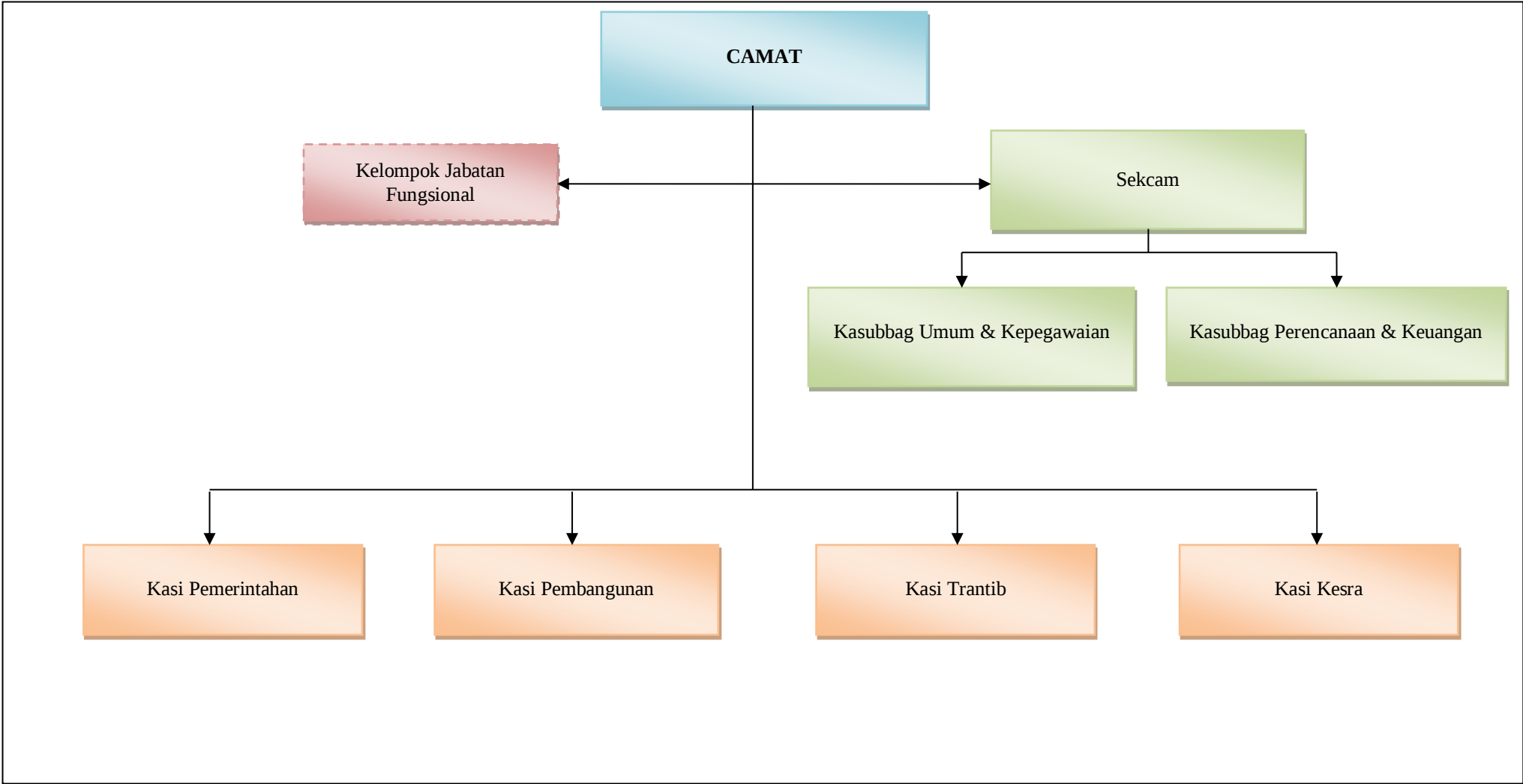
Kecamatan Muara Uya memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

c. Fungsi Kecamatan

Fungsi Kecamatan Muara Uya adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Camat selaku kepala SKPD dibantu oleh Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi 4 (empat) Seksi yang terdiri dari : Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Keamanan dan Ketertiban Umum. Berikut adalah susunan organisasi di Kecamatan Muara Uya :

Tabel : Susunan Organisasi Kecamatan Muara Uya



Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Kecamatan Muara Uya berpangku pada visi Kabupaten Tabalong **"Menuju Tabalong yang lebih agamis, sejahtera dan mandiri"** dengan mengemban misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong yang lebih agamis melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia (Tabalong Berkualitas).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong dengan mengawal pembangunan yang diarahkan agar masyarakat berkemampuan lebih dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, serta penurunan angka kemiskinan secara nyata (Tabalong Sejahtera).

Mewujudkan kemandirian daerah Kabupaten Tabalong melalui pembangunan yang diarahkan pada tercapainya system yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, social budaya dan pemerintahan untuk menciptakan kemajuan perekonomian daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Tabalong Mandiri).

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Muara Uya dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak dapat diselenggarakan di Kantor Kecamatan Muara Uya karena rusaknya system koneksi jaringan dan hingga saat ini belum ada tindakan perbaikan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong. Hal ini tentunya mengakibatkan jika ada masyarakat yang ingin membuat KTP dan Kartu Keluarga terpaksa harus berurusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong yang ada di Tanjung.

2. Adanya 2 Desa terpencil yang jarak tempuhnya dan kondisi jalannya yang sangat rusak sehingga menyulitkan pihak kecamatan dalam melakukan pembinaan ke desa-desa tersebut.
3. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan kurangnya pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan kerja dan profesionalitas aparatur Kecamatan Muara Uya.
4. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam bekerja dikalangan aparatur Kecamatan Muara Uya menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pemanfaatan waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
5. Jumlah SDM Apartur yang kurang memadai.

Disamping kendala dan kelemahan yang ada, Kecamatan Muara Uya juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Muara Uya dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Muara Uya, diantaranya :

1. Adanya struktur organisasi yang terpola.
2. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
3. Suasana kerja di Kecamatan Muara Uya yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (team work).
4. Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Muara Uya yang baik.

Adapun isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Muara Uya adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Kecamatan Muara Uya merupakan kawasan yang terindikasi memiliki Kawasan kumuh. Untuk mengurangi kekumuhan, mindset masyarakat perlu diubah sehingga tercipta kawasan tanpa kumuh

2. Bidang Pemerintahan

Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan Kecamatan Muara Uya untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan

4. Bidang Pertanian

Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah Muara Uya. Para pengembang mulai melirik tanah pertanian di Kecamatan Muara Uya untuk dijadikan perumahan

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rumusan tematik pembangunan sebagaimana disebutkan dalam RKPD Tahun 2022 adalah **“Penanganan Kesehatan dan Percepatan Pemulihan Ekonomi dalam Rangka Menciptakan SDM yang Tangguh”** dengan 5 prioritas daerah dan 15 sasaran pembangunan yang upaya pencapaiannya dijabarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. RKPD 2025 dalam hal ini mengalami perubahan salah satunya dari segi rumusan program/kegiatan/sub kegiatan. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka dalam reviu ini akan dilakukan proses membandingkan rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perubahan rencana kerja Kecamatan Muara Uya. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tabalong

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Perubahan 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)		100%	83.436.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan)		100%	70.227.600	
7.01.04.2.01	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Muara Uya	14 Patroli Terpadu	83.436.000	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	Kecamatan Muara Uya	14 Patroli Terpadu	70.227.600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan Desa		85%	184.101.344	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan Desa		85%	154.436.436	Rasionalisasi Batasan Pagu Anggaran dan Penyesuaian Standar Harga
7.01.03.2.01	2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	Kecamatan Muara Uya	14 Desa	21.816.200	2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir	Kecamatan Muara Uya	14 Desa	7.732.800	
7.01.03.2.06	3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Muara Uya	1400 Keluarga	162.285.144	3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Muara Uya	1400 Keluarga	146.703.636	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		85%		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen Penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		85%	Muara Uya	Rasionalisasi Batasan Pagu Anggaran dan Penyesuaian Standar Harga
7.01.05.2.01	4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kecamatan Muara Uya	1 Laporan	341.331.549	4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	Kecamatan Muara Uya	1 Laporan	283.765.949	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Perubahan 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		85%	79.979.992	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		85%	75.505.992	Rasionalisasi Batasan Pagu Anggaran dan Penyesuaian Standar Harga
7.01.06.2.01	5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	Kecamatan Muara Uya	14 Desa	79.979.992	5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	Kecamatan Muara Uya	14 Desa	75.505.992	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan		85%	152.038.740	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan		85%	173.808.606	
07.01.02.2.01	6 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Muara Uya	3 Laporan	152.038.740	6 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Muara Uya	3 Laporan	173.808.606	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP (predikat)		B	5.557.916.734	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP (predikat)		B	5.721.686.976	Rasionalisasi Batasan Pagu Anggaran dan Penyesuaian Standar Harga
7.01.01.2.01	7 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	Kecamatan Muara Uya	8 Dokumen	44.770.920	7 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah yang disusun	Kecamatan Muara Uya	8 Dokumen	38.596.920	
7.01.01.2.02	8 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	Kecamatan Muara Uya	20 Dokumen	2.967.194.752	8 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yag disusun	Kecamatan Muara Uya	20 Dokumen	3.023.809.747	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN perubahan 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.06	9 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Muara Uya	100%	378.032.381	9 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Muara Uya Muara Uya	100%	275.922.993	
7.01.01.2.07	10 Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah alat dan perlengkapan yang di beli	Kecamatan Muara Uya		922.093.238	10 Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah alat dan perlengkapan yang di beli	Kecamatan Muara Uya	100%	549.090.221	
7.01.01.2.08	11 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Muara Uya	100%	353.579.790	11 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Muara Uya	100%	351.945.242	
7.01.01.2.09	12 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	Kecamatan Muara Uya	35 Unit	892.245.653	12 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	Kecamatan Muara Uya	32 Unit	1.482.321.853	
JUMLAH					6.414.841.159	JUMLAH					

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN)

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 merencanakan 6 program, 12 kegiatan, dan 32 Sub Kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabalong senilai **Rp. 6.485.841.559,-**. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut secara terinci adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA, dengan anggaran sebesar Rp. 5.721.686.976,- indikator program ini adalah : Persentase layanan umum lainnya tepat waktu dengan target 85% dan Nilai SAKIP (predikat) dengan target B sedangkan kegiatannya meliputi :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - . Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - . Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, dengan anggaran sebesar Rp. 173.808.606,- indikator program ini adalah : Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan di tingkat kecamatan dengan target 85% sedangkan kegiatannya meliputi :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan rincian sub kegiatan :
- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan anggaran sebesar Rp. 154.436.436,- indikator program ini adalah : Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa dengan target 85% sedangkan kegiatannya meliputi :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan rincian sub kegiatan :
- Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, DENGAN RINCIAN Sub Kegiatan :
- Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, dengan anggaran sebesar Rp. 70.227.600,- indikator program ini adalah : Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan) dengan target 14 Desa sedangkan kegiatannya meliputi :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan rincian sub kegiatan :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM,

dengan anggaran sebesar Rp. 290.175.949,- indikator program ini adalah : Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 85% sedangkan kegiatannya meliputi :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan rincian sub kegiatan :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan anggaran sebesar Rp. 75.505.992,- indikator Program ini adalah : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa dengan Target 85 % sedangkan Kegiatannya meliputi :

a. Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rincian sub kegiatan :
 . Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa

Rencana kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya ini berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Muara Uya Tahun 2019-2024, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya Perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, dengan melibatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dan stakeholders di Kabupaten Tabalong khususnya di Kecamatan Muara Uya.

Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Muara Uya, Juli 2025
CAMAT MUARA UYA

AIDY RISYAWAL, S.STP.M.Sos
NIP. 19900502 201010 1 001